

**PERANAN AKTIVIS MUSLIM DALAM PERGULATAN  
POLITIK ISLAM DAN NASIONALISME  
(STUDI KASUS BAITUL MUSLIMIN DI DPP-PDI-PERJUANGAN JAKARTA)**



Oleh:

**ZAINAL ARIFIN, S.H.I.**  
NIM: 07234426

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA  
2009**

## PERNYATAAN KEASLIAN

INI SAYA ;

: ZAINAL ARIFIN, S.H.I

: 07.234.426

: MAGISTER

STUDI

: HUKUM ISLAM

KOSENTRASI

: STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN ISLAM

MENYATAKAN BAHWA NASKAH TESIS INI SECARA KESELURUHAN  
ADALAH HASIL/KARYA SENDIRI KECUALI PADA BAGIAN -BAGIAN  
YANG DIRUJUK SUMBERNYA.

YOGYAKARTA, APRIL 2009

SAYA YANG MENYATAKAN

  
  
ZAINAL ARIFIN, S.H  
NIM : 07.234.426



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERANAN AKTIVIS MUSLIM DALAM PERGULATAN  
POLITIK ISLAM DAN NASIONALISME  
(STUDI KASUS BAITUL MUSLIMIN DI DPP-PDI-  
PERJUANGAN JAKARTA)

Nama : Zainal Arifin, S.H.I.  
NIM : 07.234.426  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam  
Tanggal Ujian : 6 Oktober 2009

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 23 Nopember 2009



Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain  
NIP. 19490914 197703 1 001


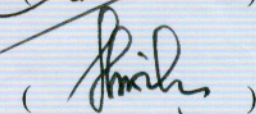
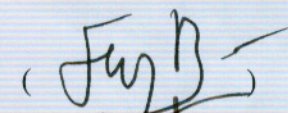
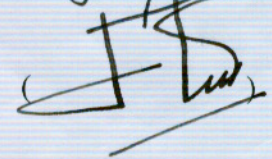
## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PERANAN AKTIVIS MUSLIM DALAM PERGULATAN  
POLITIK ISLAM DAN NASIONALISME  
(STUDI KASUS BAITUL MUSLIMIN DI DPP-PDI-  
PERJUANGAN JAKARTA)

Nama : Zainal Arifin, S.H.I.  
NIM : 07.234.426  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.  
Penguji : Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

()  
()  
()  
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 2009

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB  
Hasil/Nilai : B+ / 3,25  
Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude\*

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan ini disampaikan, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan maupun koreksi dan saran-saran terhadap naskah tesis yang berjudul

**Peran Aktifis Muslim Dalam Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme  
(Studi Kasus Baitul Muslimin Indonesia DPP PDI-Perjuangan Jakarta)**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Zainal Arifin, S.H.I
NIM	: 07.234.426
Program Studi	: Magister
Konsentrasi	: Studi Politik Dan Pemerintahan Islam

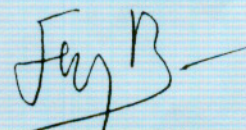
Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 April 2009

Pembimbing



Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A  
NIP. 150.216.528

## ABSTRAK

Dalam pergulatan politik di Indonesia, terdapat dua kekuatan besar yang selalu berusaha keras untuk menerapkan ideologi politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua kekuatan tersebut adalah “Islamisme dan Nasionalisme sekuler”. Mulai pra kemerdekaan sampai dengan era reformasi, dua kekuatan tersebut masih mempunyai idealisme untuk menegakkan ideologinya masing-masing dalam konteks kenegaraan di Indonesia. Perdebatan para aktivis pada waktu orla dan orba masih bergulat antara pemikiran politik Islam dan nasionalisme yang dalam ranah perdebatan tekstual sudah mulai berpikir dewasa pada masa Reformasi, sehingga pergulatan kedua politik di Negara ini harus disikapi oleh para aktivis secara bijaksana dalam mengembalikan Esensi dari tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. penyikapan terhadap kondisi bangsa saat ini juga dilakukan PDI-Perjuangan ketika pada masa Reformasi mengalami gejolak dan peristiwa 27 kelabu dan juga imaj “Mega Bintang” berusaha berbenah kedalam partai dan membentuk sayap Islam sebagai Pencitraan di partai dengan cara memberikan pemahaman Agama dengan membentuk jiwa para kadernya yang religius, terutama para aktivis Muslim yang ada di PDI-Perjuangan.

Aktivis Baitul Muslimin Indonesia PDI-Perjuangan mempunyai peranan meminimalisir pergulatan politik Islam dan Nasionalisme sehingga tidak ada lagi dikotomi diantara keduanya dengan artian sudah mencairnya pergulatan kedua politik tersebut, dengan peranya menyelesaikan masalah sosial masyarakat, berdakwah untuk memberikan pemahaman Agama di masyarakat dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimasa yang akan datang adalah kukuhnya paradigma Islam kebangsaan, yang telah diwariskan oleh *Founding Fathers*. Rajutan silaturahmi yang pernah disinggung tokoh nahdlatul ulama (NU) K.H. Ahmad Siddiq tentang kebangsaan sangat mendasar dalam konteks kebangsaan di Indonesia yang multikultural yang menitikkan pada tiga dasar pemikiran kebangsaan yang dapat memperkuat keberislaman, kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Pertama, pertalian keislaman (*al-ukhuwah al-islamiyah*), pertalian kebangsaan (*al-ukhuwah al-wathaniyah*) dan pertalian kemanusiaan (*al-ukhuwah al-basyariyyah*).

Peneliti melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara serta mengajukan pertanyaan Kebeberapa Tokoh Baitul Muslimin Indonesia dan Tokoh Ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah yang mendukung dengan berdirinya Sayaf Islam di PDI-Perjuangan. Terutama dukungan Ketua PBNU Hasyim Muzadi dan Dinsyamsuddin. Serta banyak tokoh intelektual antara lain Bang Taufiek Kiemas, Buya Syafii Maarif dan Said Aqil Siradj bersama Ormas Pemuda kedua Ormas Islam di Indonesia Tersebut. Bamusi sebagai sayaf Islam Partai juga diharapkan tampil *all out* untuk kemengan PDI-Perjuangan dan juga Para aktivis muslim di Bamusi juga dapat mengakomodir suara muslim sebagai wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) maka juga jelas bahwa ada move politik juga dengan berdirinya Bamusi.

Sehingga harapan dan Kritik penulis dengan mengangkat Tesis yang berjudul Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme dengan harapan mencoba untuk membangun pertemuan kedua pemikiran politik tersebut. Penulis juga mengkritik para Aktifis muslim dan Aktivis muslim di Bamusi untuk segera menjalankan program-program Bamusi sampai akar rumput atau lapisan bawah PDI-Perjuangan dan juga para kader partai harus berpikir obyektif dengan menggunakan politik Ideologis, politik realitis dan politik pragmatis dengan selalu menggunakan Islam sebagai etika dan moral dalam berpolitik.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	s\	es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	h}	h{	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	ṣad	s{	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	d{	de (dengan titik di bawah)
	ṭa'	t{	te (dengan titik di bawah)
	ẓa'	z{	zet (dengan titik di bawah)

	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	Lam	l	‘el
	mim	m	‘em
	nun	n	‘en
	wawu	w	w
	Ha’	h	ha
	hamzah	‘	apostrof
	Ya’	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

	ditulis	<i>‘arabiyyah</i>
	ditulis	<i>zikrullah</i>

**C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata**

**1. Bila dimatikan ditulis *h***

	ditulis	<i>dirasah</i>
	ditulis	<i>basirah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-auliya&gt;</i>
--	---------	------------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*

	ditulis	<i>Majmu’atu al-ahkam</i>
--	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah{	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dhammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah{+ alif	ditulis ditulis	a> <i>Burhan</i>
2.	Fathah{+ ya’ mati	ditulis ditulis	a> <i>Mustasyfa&gt;</i>
3.	Kasrah + yā’ mati	ditulis ditulis	i> <i>Takhyir</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis ditulis	u> <i>Nur</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah{+ ya’ mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah{+ wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a’antum</i>
	ditulis	<i>u’iddat</i>

	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
--	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	ditulis	<i>al-Qur'aṇ</i>
	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

	ditulis	<i>as-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
	Ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

MOTTO.

"JAGALAH DIRIMU DAN KELUARGAMU DARI API NERAKA"

HIDUP SATU KALI HARUS BANYAK BERMANFAAT UNTUK ORANG  
BANYAK DENGAN KUPIMPIM DIRIKU SENDIRI, KELUARGA,  
MASYARAKAT, NEGARA DAN RAKYAT DEMI TUGAS SUCI  
AGAMAKU DAN NEGERI PERTIWIKU TEMPAT BETA  
TERLAHIRKAN.

## PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

- *Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- *Kedua orang tuaku tercinta; Abah Soejadji dan Umi Umayah yang telah mengasuhku dan keempat saudaraku dengan kasih sayang mereka yang tidak luntur sepanjang masa.*
- *Calon pendamping hidupku.*
- *Kakak-kakakku dan Adikku tersayang: Bidan Eni Muzayanah, Iptu. Muhammad Mujib Ridwan, S.Psi dan Adik Toha Rouf Ghozhali S.T.*
- *Teman-teman Hukum Islam Program Studi Politik Pemerintahan Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2007.*
- *Teman-teman senasib dan seperjuangan; Abraham Baratulloh (Tatang), Soebroto (Bro), Nur Faizin, Saiful Anam dan Arif Rahman Hakim.*

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ungkapkan ke hadirat Allah SWT, kecuali alhamdulillah wasyukrulillah, atas limpahan nikmat-karunia-Nya berupa rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat mengemban tugas sebagai hamba-Nya dan mengemban amanah sebagai hamba Allah.

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di DPP PDI-Perjuangan. Penulisan tesis dengan judul “ peran Aktivis muslim dalam pergulatan politik Islam dan Nasionalisme ( Studi kasus Baitul Muslimin Indonesia DPP PDI-Perjuangan Di Jakarta) menyelesaikan program studi Hukum Islam, konsentrasi Politik Pemerintahan Islam guna memperoleh gelar Magister dalam Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segala rasa hormat dan penghargaan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain. selaku Direktur pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. DR. H. Abd Salam Arief, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah memberi arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. DR. H. Siswanto Masruri, M.A. yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulisan tesis ini.
5. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku sekretaris sidang yang telah sedia mendampingi jalannya sidang ujian tesis ini.
6. Terima kasih pula kepada para dosen pengampu dan guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik dan membuka wawasan keilmuan penulis selama menjalani pendidikan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terima kasih kepada Biro Administrasi dan Kemahasiswaan dan segenap civitas akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta, Abah Soeyadji dan Umi Umayah yang telah memberikan curahan do'a dan motivasi serta mengajarkan arti hidup, perjuangan, serta berbuat kebaikan.
9. Kakak-kakakku dan adiku tercinta Mbak Eni Muzayanah (Ratu Ema), Muhammad Mujib Ridwan( Punta) dan Adik Toha Rouf Ghodzali (Arjun) dan kakak Ipar (Niken Murbarani, S.Psi) dan keponakanku yang tercinta yang selalu memberi bantuan moril dan spiritual berupa motivasi, do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, tanpa kalian aku tak akan berhasil.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Yogyakarta, Abram, Barok, Muhaimin, Iwan, Rico, Rudi, Iskandar, Pamela, Soebroto dan Arif semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi umat.
11. Terima kasih juga kepada semua rekan seperjuangan di Program Studi Politik Pemerintahan Islam angkatan 2007 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.
12. Untuk Gerakan Kebangsanku (KSPN) dan Pemuda-Pemudi Komite Sumpah Pemuda Nusantara (KSPN) di Seantero Nusantara "Selamat berjuang bawa nilai keislaman, ke-Indonesian dan kemanusiaan yang menekankan pada demokrasi, pluralism dan persamaan dalam hukum, gengamlah dalam perjuangan untuk NKRI, kita harus tetap bersatu".

13. Sahabat di LSM Jayeng Kusuma, PMII, Ansor, Formasi, FKMT, BAMUSI PDI-Perjuangan, Advokad (PERADI) khususnya dan untuk teman-teman Muhammadiyah dan organisasi ekstra kampus lainnya.
14. Kepada semua pihak yang tersebut maupun tidak tersebut, penulis hanya dapat berdo'a, semoga segala kebaikan mereka semua mendapat ridla Allah SWT dan dicatat sebagai amal shalih diiringi ucapan Jazakumullah Khaira Al-jaza'.

Penulis menyadari sepenuhnya, tesis ini sebagai karya ilmiah merupakan langkah awal untuk memasuki cakrawala ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Tesis ini adalah karya pribadi penulis, sehingga segala kekurangan dan keterbatasan di dalam tesis ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan-masukan yang konstruktif sangat penulis harap dari berbagai pihak.

Semoga karya kecil ini secara umum bermanfaat bagi masyarakat, akademisi dan para politisi, dan secara khusus bagi penulis dan keluarga. Perjalanan akademisi yang saya tempuh selama ini semoga selalu bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara serta mendapat ridla Allah SWT sebagai amal shalih.

Yogyakarta, 6 Oktober 2009

Penulis,

Zainal Arifin, S.H.I.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	29
C. Tujuan Penelitian .....	30
D. Manfaat Penelitian .....	30
E. Tinjauan Penelitian .....	30
F. Metodologi Pembahasan .....	32
G. Kerangka Teoritik .....	38
H. Sistematika Pembahasan .....	38

## **BAB II : PERGULATAN POLITIK ISLAM DAN NASIONALISME**

### **DI INDONESIA**

A. Sejarah politik Islam dan Nasionalisme .....	42
B. Sejarah Perpolitikan Aktivis Muslim di Indonesia.....	45
C. Pergulatan Politik Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi .....	48
D. Peranan Aktivis Muslim dan Ulama dalam Menyikapi Politik Era Reformasi.....	77

## **BAB III : PERANAN AKTIVIS MUSLIM DALAM PEMBENTUKAN**

### **BAITUL MUSLIMIN INDONESIA DI MARKAS DPP PDI- PERJUANGAN**

A. Sejarah Terbentuknya PDI-Perjuangan.....	79
B. Sejarah Pembentukan Baitul Muslimin di Markas DPP PDI- Perjuangan.....	90
C. Peranan dan Tujuan Aktivis Muslim Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dalam Mewarnai Perpolitikan di PDI- Perjuangan.....	100
D. Aktivitas Aktivis Muslim dan Ormas-Ormas Islam di Baitul Muslimin Indonesia.....	135
E. Peran Aktivis muslim di DPP dan DPD Baitul Muslimin Indonesia di DKI Jakarta . ....	139

**BAB IV : BERDIRINYA BAITUL MUSLIMIN INDONESIA DALAM  
PERGULATAN POLITIK ISLAM DAN POLITIK  
NASIONALISME DI PDI-PERJUANGAN**

A. Manfaat didirikan Baitul Muslimin Indonesia bagi Perpolitikan di PDI-Perjuangan .....	149
B. Sikap Para Ulama dan Peranan Aktivis Baitul Muslimin Indonesia dalam Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme ...	156

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	162
B. Saran dan Kesan .....	163

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>165</b>
----------------------------	------------

**CURRICULUM VITAE**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Melihat peran aktivis muslim atau santri yang dibuktikan dengan pembangunan Baitul Muslimin di Kantor Pusat DPP PDI-Perjuangan menunjukkan bahwa ulama sebagai pengendali dan pembentuk moral bangsa tidak hanya berjuang pada pencapaian kekuasaan saja, tapi berusaha untuk menempatkan Islam pada fungsinya sebagai agama rahmat. Pergulatan politik saat ini sudah mulai mengesampingkan etika politik itu sendiri maka sangat benar bahwa ketika ulama mengambil bagian dalam bernegara dalam mengendalikan moral bangsa dan fungsinya untuk ikut membenahi bangsa yang besar ini.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan multikultural, etnis, suku, agama, budaya sangat rawan untuk terjadi disintegrasi bangsa. Hal inilah yang menjadi keterbukaan PDI-Perjuangan untuk benar-benar menjadikan ulama sebagai pemersatu bangsa dan membentuk karakter dari kadernya. Pembentukan serta pembangunan Baitul Muslimin di markas PDI-Perjuangan sangat jelas bahwa masyarakat Islam sudah dewasa dalam berpolitik tanpa harus memetak-metakkan kepentingan.

PDI-Perjuangan yang merupakan partai nasionalis yang basis massanya banyak masyarakat abangan harus siap untuk menjadi contoh dari partai-partai nasionalis yang lain. Keterbukaan PDI-Perjuangan harus diberikan aplaus dari berbagai pihak karena partai yang sudah cukup lama

mewarnai perpolitikan Indonesia mau membuka diri untuk menerima perubahan Intern PDI-Perjuangan.

Banyaknya Intelektual muda yang ada pada partai PDI-Perjuangan dan intelektual muda muslim Indonesia yang sudah merapatkan diri pada partai PDI-Perjuangan membuktikan bahwa PDI-Perjuangan yang benar-benar menerima keterbukaan dalam berdemokrasi. Dalam konteks ini saya sepakat bahwa pendapat cendekiawan muslim, Nurcholis Madjid tentang pernyataannya yang mengatakan “Islam yes partai Islam no” dalam konteks ini saya memahami bahwa Islam lahir dan ada untuk menjadi agama rohmat yang perannya lebih universal.

Dalam penelitian di markas DPP PDI-Perjuangan peneliti ingin mengetahui beberapa besar peran aktivis muslim di Baitul Muslimin dalam menyikapi kondisi PDI-Perjuangan dengan berusaha melihat berapa besar perannya untuk memberikan wadah didalam bagi penguatan politikus muda muslim yang menjadi kader PDI-Perjuangan.

Dalam penelitian di kantor DPP PDI-Perjuangan peneliti juga ingin mengetahui beberapa besar peran ulama dalam menyikapi kondisi PDI-Perjuangan dengan berusaha melihat berapa besar perannya untuk memberikan wadah didalam bagi penguatan politikus muda muslim yang menjadi kader PDI-Perjuangan. Peresmian Baitul Muslimin yang diantaranya dihadiri tokoh ulama Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua PBNU K. H. Hasyim Muzadi.

Ibu Megawati memberikan sambutan pada acara tersebut, dalam akhir acara peresmian Ibu Megawati selaku ketua umum PDI-Perjuangan menyatakan bahwa PDI-Perjuangan sekarang sudah berselendang hijau. Hal ini sekali lagi menurut peneliti sangat penting untuk menjadi kajian penelitian dalam menempatkan peran ulama dalam memfasilitasi kader PDI-Perjuangan yang beragama Islam karena hal inilah kebebasan berorganisasi dan tuntutan zaman saat ini. dua tokoh dari dua organisasi terbesar di Indonesia. Peneliti berupaya atau berusaha mencairkan image buruk yang terjadi di PDI-Perjuangan yang mana hal ini harus dikaji dengan observasi dan wawancara. Sumbangan pemikiran dari ulama yang menjadikan Baitul Muslimin di markas DPP PDI-Perjuangan, yang dapat dijadikan pijakan kawan-kawan Muhammadiyah atau kawan-kawan NU dengan lebih berpikir luas dalam mengartikan bagaimana kita bisa menjadi bagian penting dalam naungan Partai Demokrasi Indonesia perjuangan yang dapat mevariasi didalam perjuangan PDI-Perjuangan dalam membentuk negara yang lebih baik dalam proses penegakan kedaulatan di tangan rakyat sebagai wujud demokrasi itu sendiri.

Peneliti juga mencoba menghubungkan serta memahami pemikiran ulama dan negarawan pada era sejarah pembentukan NKRI dalam pandangan Bung Karno, selain itu penulis juga mencoba mengkaji Keislaman dan Nasionalisme Bung Karno. Bung Karno lahir dari seorang Ibu yang beragama Hindu dari keturunan bangsawan Bali. Setidak-tidaknya ini dapat dilihat dari

kenyataan bahwa Singaraja yang terakhir adalah pamanya dan seorang ayah yang beragama Islam Jawa yang gemar melihat cerita wayang<sup>1</sup>.

Pada masa kecil Soekarno dipindahkan ayahnya dari Surabaya ke Tulungagung ikut bersama kakeknya yang terkenal mempunyai ilmu hikmah atau kebatinan.

Soekarno masih mempunyai garis keturunan dari Sultan Kediri dan dilihat dari keluarga ayahnya Soekarno berasal dari keturunan priyayi rendahan.<sup>2</sup> kedudukan sosial-ekonomi keluarga Soekemi hanya agak sedikit lebih baik dari golongan kebanyakan bangsa Indonesia yang dikemudian hari disebut Soekarno dengan istilah Marhaen. Itu bila dilihat dari kaca mata sosial. Tetapi bila dilihat dari kacamata agama dan kepercayaan, ia dapat digolongkan sebagai orang yang berasal dari golongan “abangan”. Bahkan cara pandang Soekarno, sudah pasti bukanlah cara pandang Arab terhadap Islam yang juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Akan tetapi harus juga berani kita nyatakan, bahwa cara pandang terhadap Islam lewat cara pandang yang selama ini dikenal sebagai cara pandang Islam, belum tentu memecahkan masalah kemunduran umat Islam, sebagaimana yang ingin didiskusikan Soekarno.

Kunci masalah ini tampaknya terletak pada sikap kita mengidealisasikan sosok sosiologis, historis serta doktrin Islam yang ketat, seperti yang telah dikemukakan di awal karangan ini. Idealisasi yang amat

---

<sup>1</sup> Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Nasir,” *Polemik Negara Islam*”: Teraju Jakarta Selatan: 2002. hal. 16

<sup>2</sup> Onghokham Soekarno: *Mitos dan Realitas*”, dalam Taufik AP3ES, Jbdullah(ed) *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta, 1981, hal. 21

ketat sering membutakan mata kita padahal yang substansial dalam Islam itu sendiri. Idealisasi itu pula yang menyebabkan tabunya cara pandang dunia terhadap Islam, konsekuensi dari dua bentuk persepsi keislaman ini telah mendorong kita memahami Islam sebagai sebuah ajaran yang secara bulat-bulat datang dari Allah, tanpa berbaur dengan dinamika kehidupan.

Dunia Islam yang kita pahami dalam cara pandang seperti itu adalah Islam yang seakan-akan bukan agama untuk manusia; bukan agama yang harus mengalami suatu proses kehidupan; sesuatu yang telah ada dan tidak berubah. Dalam bentuk yang lebih ekstrem dari pandang seperti ini, Islam lebih dipahami sebagai sebuah mitos, yang seakan-akan, dengan menyebut ayat-ayat suci ataupun simbol-simbol Islam lainnya, telah menyelesaikan semua persoalan.

Lebih dari itu dan merupakan hal yang paling penting fundamental dalam pemikiran tentang Islam dewasa ini adalah bahwa, apa yang diyakini sebagai sistem keislaman merupakan pengalaman yang diangkat dari interaksi antara norma-norma atau nilai-nilai Islam dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya dalam masyarakat dan kurun masa tertentu. Implikasi dari bentuk interaksi ini-suatu interaksi yang terbatas pada tipe masyarakat dan masa tertentu-melahirkan sistem pemikiran, dan mungkin juga, sistem doktrinal dalam pengertian yang begitu spesifik serta sistem sosial ekonomi politik yang khas. Sesuai dengan kapabilitas suatu masa dan berbagai lembaga sosial-budaya, politik dan ekonomis pada masa itu, untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Suatu pemikiran, menurut semangat pemikiran Soekarno

ditolak. Ide Soekarno yang lebih mengutamakan nasionalisme Islam, bukan universalisme Islam merupakan indikator bahwa pada dasarnya, Islam tidak harus terjebak oleh suatu proses pembentukan struktur dalam masyarakat apapun ataupun kurun masa tertentu. Oleh karena ia berproses bersama dengan sejarah manusia, maka penampilan Islam menjadi sangat dipengaruhi oleh kemampuan struktur lingkungan manusia. Munculnya dinasti dalam sistem politik Islam yang menandai kerajaan usmaniyah, merupakan indikator bahwa betapa performance Islam ditentukan oleh lingkungan struktural manusia itu sendiri.

Pada hemat penulis, inilah inti atau substansi dari pemikiran Islam Soekarno. Suatu bentuk pemikiran yang berupaya melepaskan Islam dari perangkap struktur interpretasi yang terlalu menekankan pada proses interaksi Islam dalam masyarakat dan kurun masa waktu tertentu. Selanjutnya Soekarno, berusaha melihat Islam dari aspek yang lebih empiris yang mendorongnya untuk melakukan pendekatan sejarah terhadap Islam.

Masalahnya sekarang, apakah salah melihat Islam dan berusaha memperbaiki atau memecahkan masalah Islam lewat pendekatan ini?, bicara sejarah Soekarno dan Moh. Hatta adalah bagian sejarah bukan keduanya yang menguasai perjalanan sejarah, kedua tokoh tersebut adalah bagian dari agenda kepemimpinan muda. Keduanya menekankan kesetaraan dan keadilan yang merata. Prajurit, romusa, ulama, santri, dan rakyat jelata adalah bagian statement untuk menganggap dia yang berkuasa karena siapa yang dekat dengan penguasa dia yang mendapatkan kekuasaan. *Frame work* kita sebagai

Negara yang berdaulat belum jelas. Penggabungan ide cerdas dari para akademisi, para politisi, negarawan dan tokoh agama belum berjalan.

Mahfud MD berpendapat bahwa Indonesia banyak mempunyai dewan yang cerdas tapi tidak mau menggunakan kecerdasan untuk kepentingan rakyat. Agama sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan, fatwa dijadikan penguat dalam melegitimasi kepentingan. Kemerdekaan ulama dalam berpendapat cenderung mengandung kepentingan yang syarat konflik agama bukan sebagai pendamai tapi cenderung dibawa ke arena konflik. Pertarungan politik sudah mau ditabuh persiapan Intelektual sudah disiapkan. Ibarat tentara tembak dan ransel sudah disiapkan untuk menggempur lawan tanpa memikirkan banyaknya rakyat yang selalu menuntut keadilan dan pemenuhan hak atas kewajiban pajak dari rakyat yang tidak diperhatikan. Rakyat tidak peduli siapa pemimpinnya, dari mana asalnya tapi rakyat lebih berpikir bagaimana rakyat dibawa ke pulau harapan dengan satu tujuan menghantarkan masyarakat pada kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka inilah demokrasi, Bung, Bang, Mas, Kang, Gus, Dewi, Ning, Cicik, semua adalah sama. Siapa yang berani menjadi jargon demokrasi atau pelaku sejarah harus siap menghadapi realitas kita saat ini.

Persoalan negara nasional dan cita-cita Islam. Apakah ada cita-cita Islam, saudara-saudara?, dengan tegas jawabannya ialah: ya ada. Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam cita-cita. Cita-cita mengenai ketatanegaraan punya. Tentang hal ini, saudara-saudara, terutama sekali dikalangan intelektual masih banyak kesalah-pahaman. Masih sering

kita mendengar ucapan: “Janganlah dibawa agama didalam urusan negara janganlah dibawa urusan agama didalam hal politik,” ini tidak sesuai dengan Islam. Islam bukanlah apa yang dinamakan orang satu *privat zaak* (urusan pribadi, ed). Islam tidak mengenal batas antara apa yang biasa disebutkan “agama” dengan kehidupan kemasyarakatan, hidup kenegaraan. Islam bukan suatu urusan istana. Islam adalah satu hal yang menurut pemeluknya, menurut nabinya menurut kitab suci Al-Qur’an, satu hal yang mengenai, boleh dikatakan segala hubungan antara manusia dan tuhan dan antara manusia dengan manusia. ucapan agama adalah *privat zaak*, sebagaimana tadi kukatakan, tidak sesuai dengan Islam. Islam adalah bukan sekedar satu cara hidup melulu untuk itu. Pengertian Islam dikatakan bahwa Islam Adalah suatu *way of life. Islam is not merely a religion*-bukan sekedar suatu Agama-*but Islam is a way of life*. Satu hal yang mengenai hidup dari pemeluk-pemeluknya seluruhnya<sup>3</sup>.

Dalam menegakkan syariah Islam dan konfrontasi kekuatan politik Islam (pembaharuan) dengan negara orde baru. Peran penting kekuatan politik Islam dalam menumbangkan elemen-elemen orde lama, yang berarti, yang berarti memiliki saham besar dalam membidani lahirnya orde baru, mempengaruhi kondisi psikologis elit Islam untuk mereabilitasi Instrumen politik partai Islam. Semangat umum strategi pengedepanan perjuangan umat melalui partai Islam sendiri mengkristal dikalangan pemimpin Islam karena

---

<sup>3</sup> Suwidi tono, *Bung Karno Negara Nasional dan cita-cita Islam*, (Vision 03 Depok 2003), hal. 6.

persepsi mereka terhadap konstelasi politik kepartaian pada periode transisi orde lama ke orde baru.

Konfigurasi politik masa peralihan itu terlihat partai-partai Islam secara teoritik dalam struktur politik yang demokratis tidak akan mengalami pesaing politik berat, karena rival potensialnya PKI telah collapse dan PNI mengalami keretakan internal yang serius. Namun strategi kaum muslim yang memfokuskan artikulasi politiknya melalui partai Islam ternyata berbenturan dengan strategi stabilitas politik Negara yang secara ketat membatasi politik kepartaian. Perbedaan tajam logika strategi kekuatan Islam dengan negara orde baru diperuncing oleh dominasi kelompok abangan dan Kristen Katolik di berbagai sektor negara.

Dominasi kelompok minoritas yang paling menonjol peranannya dalam membentuk visi negara, yang dalam beberapa hal menyudutkan kaum Nasionalis, banyak dilakukan orang-orang di lingkaran Ali Muertofo dengan kelompok Tanah Abang atau CSIS-nya.

Baru pada Akhir 1950-an banyak kesempatan anak santri menjadi calon jenderal yang tersalurkan pada Akademi Militer Nasional (AMN) yang baru dibuka. Keterlambatan di bidang militer ini terlihat juga hasilnya pada kepemimpinan militer dikemudian hari. Tatkala di birokrasi sipil dan dunia universitas pada tahun 1980-an anak-anak santri sudah trampil proporsional, di sektor militer pada dekade 1990-an.

Apa yang penting dikemukakan dari berbagai pergeseran dinamika intelektual angkatan bersenjata diatas adalah suatu generasi baru di militer

yang memiliki pandangan yang lebih simpatik terhadap masyarakat. Politik Islam telah mulai tumbuh, dengan demikian hubungan antara kekuatan politik Islam dengan militer sedang bergerak ke arah perkembangan baru yang lebih baik.<sup>4</sup>

Kenyataan politik yang dialami umat Islam itu merupakan persoalan yang mesti dipecahkan kaum intelektual Islam persoalan itu antara lain, pertama mengapa umat Islam selalu dipojokkan sebagai golongan anti Pancasila padahal sila-silanya tak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan pada saat-saat menjelang proklamasi kemerdekaan para pemimpin Islam terkemuka ikut serta dalam mukadimah UUD 1945 kedua mengangkat persoalan politik, yaitu mengapa golongan politik Islam tidak bisa ikut serta dalam memimpin negara dan duduk dalam pemerintahan seperti yang terjadi dalam satu dasa warsa sesudah 1945?, ketiga bagaimana sikap kaum muslimin terhadap arus modernisasi yang menjadi landasan kebijakan orde baru. Apakah mereka akan ikut serta dalam program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh negara-negara barat itu?

Pertanyaan-pertanyaan itu memunculkan retrospeksi di kalangan intelektual muslim terhadap perjalanan politik yang telah dilalui umat Islam. Mereka umumnya berpendapat suatu gerak perubahan perlu segera dilakukan untuk menjawab berbagai problem yang dihadapi kaum muslimin. Pandangan ini memunculkan suatu gerakan apa yang disebut sebagai pemikiran baru Islam dikalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970-an yang merupakan

---

<sup>4</sup> Aminudin, *kekuasaan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia*, (pustaka pelajar, jogyakarta, 1999), hal. 205.

perkembangan radikal dalam pemikiran politik keagamaan umat Islam pada zaman orde baru. Gerakan “pemikiran baru” itu tidak saja membicarakan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan, terutama yang berhubungan dengan persoalan politik Umat Islam serta bagaimana melakukan terobosan-terobosan untuk mengembalikan daya gerak psikologis (*psychological striking force*) umat Islam dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran baru (intelektualisme baru) menurut Bahtiar Effendy, membawa tiga implikasi:

1. Mereformulasikan dasar-dasar keagamaan/teologis politik
2. Mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam
3. Meninjau kembali strategi politik Islam.

Dalam kajian ini akan memfokuskan pada peninjauan ulang strategi perjuangan para tokoh Islam. Karena hal itulah yang banyak mempengaruhi aksi politik para pemimpin Muslim. Disamping itu, implikasi gerakan “pemikiran baru” yang mencakup reformulasi teologis dan redefinisi cita-cita politik Islam.

Rasa tak percaya terhadap efektifitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala general dikalangan gerakan “pemikiran baru”. Bahkan Endang, dalam tesis menyebutkan “*Islam Yes, Partai Islam No*” memang tengah menggejala dikalangan umat. Pernyataan lebih eksplisit yang mengekspresikan pandangan sangat skeptis terhadap “partai Islam” juga ditemukan dalam beberapa tulisan Amin Rais, seorang Intelektual yang

memiliki pengaruh luas di Muhammadiyah. Dalam sebuah refleksi terhadap dinamika politik Islam Indonesia, dia menyatakan: “Terbukti pada hasil pemilu, baik untuk parlemen maupun konstituante 1955, Empat partai Islam (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) hanya berhasil mengumpulkan suara sekitar 42%. Demikian juga dalam pemilu 1971 (NU, Parmusi, PSSI, dan Perti), tahun 1977 dan 1982(PPP) menunjukkan bahwa partai Islam hanya mampu mencapai sepertiga dari jumlah suara. Bahwa mungkin ketiga pemilu di zaman “orba” disana-sini merupakan suatu kemungkinan, namun kiranya disepakati bahwa andai kata benar-benar LUBER pun, partai Islam tidak akan dapat mencapai mayoritas. ”

Pandangan yang hampir sama, meskipun secara tidak langsung dinyatakan Abdurrahman Wahid tokoh sentral “pembaharuan Islam“ dari NU ketika melakukan tinjauan kritisnya terhadap posisi gerakan Islam (*Islamic Movement*) dalam konstelasi orde baru: “Selanjutnya yang perlu kita garap adalah kelompok-kelompok strategis itu. Saya berkali-kali mengatakan bahwa keputusan politik: militer, birokrat, orpol, ormas, profesi, LSM, dan pers. Saya kira inilah kelompok-kelompok strategis”.

Dari ungkapan pemikiran Gus Dur (panggilan Abdurrahman Wahid) diatas, kita bisa mengungkap adanya semangat untuk tidak memandang “partai politik” sebagai instrument politik yang segala-galanya bagi umat Islam. Kalaupun harus melalui jalur “Partai Islam” seperti PPP, itu bukan satu-satunya bagi artikulasi politik kaum muslim.

Perpolitikan yang sekarang jauh dari rakyat adalah bukti kegagalan reformasi. Reformasi yang banyak melibatkan ribuan orang yang terpenggang dan kawan-kawan Aktivis 98 yang gugur atas nama rakyat hanya jadi tumbal kekuasaan.

Kapan lagi menyuarakan suara rakyat yang sudah habis suaranya karena bungkaman dengan keadaan ekonomi dan pekerjaan yang sulit ditengah-tengah kondisi bangsa saat ini. Pemutusan pekerjaan (PHK), kasus lapindo, ISU fatwa MUI yang membingungkan masyarakat dan umat dengan masalah-masalah yang praktis belum terselesaikan apakah ini bukti bahwa hukum hanyalah pesanan pejabat bukan tuntutan penegakan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Mengapa hanya pencitraan atau kekuasaan sebagai saluran untuk ambisi sekelompok orang tanpa harus melihat hidup rakyatnya. Masih banyak anak-anak di kolong jembatan, masih banyak tugas negara untuk rakyatnya dalam mencerdaskan dan membesarkan tunas bangsa

KKN yang didengungkan hanya jadi logo negara, bukti tidak ada, yang lemah tetap tak berdaya dan selalu teraniaya, yang miskin semakin miskin dan yang pusat hanya bicara uang rakyat. Kapan suara rakyat didengar oleh pejabat karena banyak agenda asing di negaraku. Tentara dan polisi hanya pengawal segelincir kepentingan yang membayar, rakyat butuh tentara yang idealis dan patriotis dan merakyat karena rakyat dan tentara tidak bisa dipisahkan ibarat daun dan pohon saling menguntungkan.

Negara hanya mengurus masalah yang tidak penting atau tidak krusial. Sedangkan kelaparan dan kasus bunuh diri terus bertambah. Saat ini rakyat dipimpin dalam keadaan lapar, rakyat dipimpin dalam keadaan sakit dan pejabat bernostalgia dengan KPK, berapa yang berhasil dikumpulkan oleh Negara tidak dipublikasikan kepada rakyat. Bagi yang menjabat atau tangan panjang pejabat atau para calo parpol tidak gelisah tapi apa tidak gelisah kawan-kawan yang tergusur, kawan-kawan yang tidur di kolom jembatan.<sup>5</sup> Pemikiran saya tentang demokrasi adalah hasil karya pejabat saja tanpa poling kerakyat. Kalau anda bilang sudah besar anda masih kecil kalau anda bilang sudah berjuang maka anda masih kecil kalau anda bilang sudah berkorban itu bohong karena hidup ini adalah bagian dari berjuang, berkorban dan besar. Kebesaran kita adalah buah karya rakyat bukan ego kita saja. Do'a mereka dan keputusan yang diatas yang semata-mata mengangkat kita dalam derajat yang tinggi. Tanpa kita meninggalkan usaha dan doa karena itulah yang bisa kita lakukan. Bagi penulis kalau memandaikan orang yang sudah pandai itu bukan perjuangan tapi mengangkat anak kolom jembatan menjadi besar itulah seorang yang demokratis, bukan mengirim keluar negeri orang yang terpilih baru pulang ke luar negeri hanya penindas baru. Maka itu bukan pemerataan, tapi beasiswa tidak tepat sasaran.

Demokrasi bicara kesejahteraan apakah kesejahteraan hanya untuk satu golongan atau wadah maka itu bukan demokrasi tapi antek penindas. Demokrasi harus jauh dari penindasan dan pembunuhan jiwa, fisik serta

---

<sup>5</sup> Wawancara publik

intelektual. Demokrasi harus membawa rakyat kepada kemajuan bukan membicarakan siapa saya dan ini saya tapi demokrasi harus bicara rakyat. Apa saat ini kita bisa bekerja untuk rakyat apa kita sudah membaur dengan rakyat dan apakah kita sudah mendengar rintihan rakyat ataupun bisa bangga dengan rakyat kita. Kekuasaan demokrasi harus di tangan rakyat bukan segelincir demokrasinya pejabat. Pemimpin rakyat harus turun ke pelosok desa bukan hanya dengan pengawal pemimpin harus melayani keperluan rakyat baik sarana ibadah, pangan, sandang, dan papan karena pada pemimpin mengamanahkan amanat pada pemimpinnya.

Pertarungan para pemimpin saat ini lebih pada wacana, dan wacana dipertandingkan media dan media bisa menyingkirkan penguasa. Anda pernah menyaksikan kepemimpinan yang merakyat digulingkan kepentingan barat siapa dia? Dan sekarang bermain pada partai apa dan sebagai penjaga gawang atau guru bangsakah beliau? Anda pasti tahu dan siapa yang tegas memimpin bangsa anda yang bisa bicara? Yang jelas pemilu 2009 adalah rakyat yang memilih dan yang bicara. Kalau anda bilang Islam *kaffah*, maka 2009 Anda harus bicara pemimpin yang *kaffah* yang benar-benar bicara rakyat. KH. Abdurahman wahid bicara pada Kick Andy bahwa beliau menempatkan kepemimpinannya pada tiga pilar (1) tentang Keislaman (2) Keindonesiaan (3) kemanusiaan menekankan pada demokrasi, pluralism, dan persamaan dalam hukum.

Taufiq Kiemas tokoh yang menyatakan sebagai penjaga gawang nasionalisme yang bicara pada majalah bulanan terbitan Baitul Muslimin

Press yang mengatakan sebagai sebuah partai nasionalisme sebagai Ideologi dan alat perjuangan dan tetap utuhnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai tujuan utama perjuangan politik, PDI-Perjuangan tak akan berhenti mengajak semua elemen bangsa untuk berdialog, bertukar pikiran, dan bersinergi dalam membangun bangsa kita yang besar, bangsa Indonesia. Didirikannya Baitul Muslimin Indonesia, dimana para aktivisnya datang atau sengaja didatangkan dari berbagai organisasi berbasis keislaman yang berbeda-beda, adalah bukti kongkrit bahwa partai ini selalu siap membina pluralism yang tumbuh subur.

### **Agama dan Politik**

Kampanye pemilu mengungkapkan adanya perubahan pandangan dalam tubuh NU berkaitan dengan masalah politik dan agama. Kedua masalah tersebut sebelumnya tidak tumpang tindih. Para pemimpin NU terus menerus menganjurkan anggotanya agar memanfaatkan acara-acara keagamaan untuk mempromosikan kepentingan partai. Terutama didorong untuk menyelenggarakan upacara dan perayaan-perayaan yang paling banyak menarik peminat dari masyarakat setempat dan mampu menciptakan kesan yang baik terhadap NU. Misalnya perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra' Miraj, tahlil, khaul, atau khitanan massal. Anggota NU juga diperintahkan untuk membantu para calon pemilih, seperti ikut mengatur upacara perkawinan dan pemakaman sehingga bisa mendatangkan rasa hutang budi. Walaupun aktivitas seperti itu selalu dilakukan untuk kepentingan

rohaniyah jama'ah setempat namun selama masa kampanye tujuannya lebih mengarah pada kepentingan politik.<sup>6</sup>

Gambaran lain yang memperlihatkan kekaburan antara agama dan politik adalah penggunaan infaq dan zakat untuk membiayai pemilu. Infaq biasanya merupakan sumbangan untuk kepentingan agama atau sosial yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan atau perbaikan masjid, rumah sakit, panti asuhan atau sekolah. Akan tetapi selama masa kampanye, cabang-cabang NU menganggap bahwa sumbangan apapun yang berupa uang atau materi untuk tujuan pemilu dapat dikategorikan infaq, oleh karenanya sumbangan itu juga memberikan pahala bagi penyumbangannya. Yang lebih kontroversial lagi adalah sumber dana yang berasal dari zakat. Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam setiap orang diwajibkan untuk menyumbang 2,5% dari kekayaan yang disumbangkan. Zakat biasanya diberikan untuk tujuan amal seperti membantu orang yang miskin dan lemah. Syuriah NU memutuskan bahwa zakat dapat digunakan untuk membiayai pemilu, dengan syarat hanya untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk selama kampanye. Pemimpin partai yang pragmatis menyatakan bahwa berkurangnya berbagai kegiatan amal untuk sementara waktu karena akibat pengalihgunaan infaq dan zakat, akan segera mendapat kompensasi lebih besar setelah NU berhasil dalam politik.

Contoh-contoh di atas merupakan bukti politisasi agama selama periode ini. Sebagai akibatnya, NU yang hingga pertengahan 1940-an

---

<sup>6</sup>Greg fealy, *Ijtihad politik Ulama sejarah NU 1952-1967*, LKIS, Yogyakarta 1998

merupakan organisasi keagamaan yang buta politik sekarang melihat politik dan agama sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap bantuan yang diberikan untuk kepentingan partai selalu dianggap sebagai bantuan terhadap Islam terutama Islam tradisional. Seorang santri muda mengatakan pada Clifford Geertz sebelum pemilu: setiap orang menaruh minat pada politik... mereka menganggap kalau mereka menang dalam percaturan politik, nanti mereka tidak akan menemui kesulitan lagi dalam masalah Agama.<sup>7</sup>

Kaum muslimin Indonesia atau aktivis muslim Indonesia (santri) sebagai pelaku sejarah. Artinya manusia muslim yang bersosialitas hendak menyejarah mengantisipasi kenyataan politik yang dihadapinya pada waktu itu, dengan berbekalkan iman, ilmu, pengalaman, dan kemampuan yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita politik yang dikembangkan dari keyakinan ontologis tertentu, iman Islam. Watak ganda manusia ini, spiritualitas dan materialitas, akan berbenturan dengan dirinya sendiri, kawan dalam kelompok antar kelompok yang dianggap sejalan, bahkan lebih sengit lagi diarahkan kepada mereka yang dianggap sebagai lawan-yang kesemuanya berjalan tergantung pada kadar keimanan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengantisipasi kenyataan politik zamannya.<sup>8</sup>

Beralih aktifitas aktivis muslim di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam pergulatan politik nasional dan politik Islam yang membentuk sayap partai yang diberi nama Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dan adanya tokoh Intelektual muslim seperti Din

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Yudian Wahyudi, *Maqosid Syari'ah, dalam Pergumulan Politik*, (Nawesea, Yogyakarta 2007). hal. 60.

Syamsuddin ketua PB Muhammadiyah dan Hasyim Muzadi ketua PBNU, DR. Said Agiel Siroj, Prof. DR. Syafi'i Ma'arif, Taufiq Kiemas, dan Akbar Tanjung. Ini merupakan babak baru perpolitikan Islam di Indonesia dalam mengaktualisasikan antara nasionalis dan Islam dalam sebuah partai nasionalis PDI-Perjuangan.<sup>9</sup> Merupakan cikal bakal Partai PDI-Perjuangan dalam membuka tabir kebuntuan pada pergulatan politik Islam dan politik Nasionalis pada masa orla, orba dan era reformasi yang lebih menyoroti fungsi ulama dan parpol didalam perpolitikan yang belum stabil atau sesuai tuntutan masyarakat yang menginginkan proses demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu yang jujur, adil dan terbuka yang merupakan tuntutan seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat suku, ras, agama, keturunan, derajat, pangkat yang melekat dalam diri seseorang calon wakil rakyat.

PDI-Perjuangan yang merupakan partai nasionalis melalui Baitul Muslimin berusaha memadukan antara nasionalis dan spiritualis yang lebih menekankan Dakwah dalam kehidupan politik dan agama yang lebih dinamis, serta dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Baitul Muslimin melalui PDI-Perjuangan juga memandang penting masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bicara ekonomi kerakyatan disatu sisi dan Bicara ekonomi islam dalam sisi yang lain serta masalah pemerintahan ataupun masalah kepemimpinan wanita (gender) dalam menyikapi itu Baitul Muslimin juga melakukan tanggapan tentang masalah gender. Baitul Muslimin juga berusaha menyikapi kasus-kasus lapangan yang terjadi di

---

<sup>9</sup> *Wawancara*, Rasyidi HY, Ketua BAMUSI di DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta 14 Januari 2009

beberapa waktu yang tentang masalah Hukum (UU Pornografi dan Porno Aksi), masalah tragedi Monas AKKBP serta masalah HAM.

Ekonomi kerakyatan menduduki tempat yang sangat sentral dalam ideologi kerakyatan karena mempunyai posisi kunci dalam penyelenggaraan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta kebebasan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Ekonomi kerakyatan adalah strategi untuk menghilangkan jarak dampak negatife ekonomi pasar yang terlalu mudah membuka peluang terciptanya proktariat dengan praktiknya yang eksploitatif.

Ekonomi kerakyatan adalah pelaksanaan strategi pembangunan berdasarkan pembagian merata dan meluas dalam hal kesempatan berusaha, dengan penyebaran secara hasil, baik secara horizontal (meliputi seluruh wilayah) maupun vertikal (daerah perkotaan maupun khususnya daerah pedesaan), investasi-investasi dalam segala usaha yang produktif dan efisien terciptalah fondasi yang kuat bagi keadilan dan pemerataan yang lebih berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Islam sejati.<sup>10</sup>

### **Tertib Politik dan Kemerosotan Politik**

Kesenjangan politik yang paling penting antar negara pada hakekatnya tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahannya perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran ternyata tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara Negara yang politiknya mencerminkan consensus, komunitas, Efektifitas, stabilitas, dan Negara yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Baik

---

<sup>10</sup> Sarbini sumawinata, *politik Ekonomi kerakyatan*, PT Garindo pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Negara-negara totaliter, komunis maupun Negara-negara liberal barat pada umumnya termasuk didalam konfigurasi sistem politik yang lemah, Amerika serikat, Inggris dan rusia masing-masing mempunyai bentuk pemerintahan berbeda namun didalam ketiga sistem tersebut jelas pemerintah berfungsi aktif.<sup>11</sup>

### **Dinamika Demokrasi**

Sistem Pilkada di Indonesia sepanjang lebih dari setengah abad merdeka sebagaimana dipaparkan dimuka secara demokrasi tidak terlalu bergeser jauh dari sistem Pilkada masa penjajahan Belanda dan Jepang. baik pada masa pemerintahan orde lama maupun orde baru, hamper seluruh sistem dalam ketentuan perundangan yang digunakan menempatkan penguasa pusat, khususnya presiden dan menteri dalam negeri atau sebutan sejenis, dalam posisi sangat menentukan.

Pada masa reformasi demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan pemilihan langsung dan Pilkada langsung.<sup>12</sup> Kendati begitu, meskipun belum maksimal, sejumlah kemajuan penting yang merupakan investasi politik untuk menopang terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi telah diraih. Sedikitnya yaitu masih berlangsungnya liberalisasi politik bagi publik, tegaknya prinsip *check and balances* antar lembaga negara, dan upaya Presiden Abdurrahman Wahid mengikis dominasi militer dalam konfigurasi politik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Samuel P Huntinton, *tertib politik, pada masyarakat yang sedang berubah*, PT Raja Grafindo persada 2004

<sup>12</sup>Joko J prihatmoko, *pemilihan kepala daerah langsung, Filosofi, sistem dan problem penerapan di Indonesia*, LP3M Universitas Wahid hasyim, Pustaka: 2005, hal. 85-88.

Pada periode Presiden Megawati saat ini, cita-cita merengkuh demokrasi yang terkonsolidasi itu masih belum surut, meskipun juga tidak terlalu menggebu. Tetapi sejumlah gejala yang muncul belakangan ini tampak berpotensi merintangi jalan menuju demokrasi yang terkonsolidasi tersebut.<sup>13</sup>

### **Moral Agama**

Indonesia *dream* adalah salah satu slogan yang kerap diagungkan oleh Marzuki Ustman. Muatan dari slogan itu adalah mimpi dari rakyat Indonesia yang kaya raya. Kendala untuk mewujudkan Indonesia dream-nya Marzuki dari aspek budaya, selain budaya dan sikap mental pragmatis yang cetak orde baru adalah juga kultur kolonialisme dan feodalisme. Bagi Marzuki, kultur warisan masa penjajahan ini menghambat proses pembentukan masyarakat yang secara hakiki betul-betul merdeka, yakni merdeka dalam berpikir, berbicara, dan berbuat.

Secara pribadi, dengan berbagi kontribusi yang telah diberikan melalui kebahagiaannya, yaitu selama masih hidup ingin menyaksikan kehebatan rakyat Indonesia. “Kebahagiaan bagi saya adalah ingin menikmati ketika saya masih hidup, bisa melihat rakyat, bisa melihat rakyat Indonesia hebat, seperti do’a Nabi Ibrahim yang meminta keturunan yang baik dan amal jariyah”, kata ayah saya ketika dia mau meninggal; dia bilang bahwa yang bisa membuat kita dan amal jariyah seperti membangun jalan, jembatan, dan ilmu yang diamalkan termasuk juga didalamnya, membangun sistem seperti yang dilakukan Bung

---

<sup>13</sup> Munafrizal manan, *pentas politik Indonesia pasca orde baru*, (IRE press Yogyakarta 2005), hal. 158.

Karno “jangan sampai saya termasuk orang yang menyaksikan kehancuran Indonesia” ujar Marzuki Ustman.<sup>14</sup>

Masa depan syariah sekularisme dan perspektif Islam syariah memiliki masa depan yang lama dalam kehidupan publik masyarakat Islam. Islam syariah dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosialisasi syariah, akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan publik melalui proses politik yang demokratis.<sup>15</sup>

### **Islam dan Negara**

Sifat religius syariah dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara tuhan dan manusia mungkin jadi satu-satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan-pengadilan sekuler yang berfungsi memutuskan perkara-perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum. Aspek lain dari syariah hukum masyarakat Islam yang diasosiasikan dengan sifat religious adalah perkembangan fatwa (ifta) ulama yang tidak terikat dengan negara mengeluarkan opini-opini hukum (fatwa) atas permintaan gubernur provinsi dan hakim-hakim negara, disamping memberikan nasehat pribadi kepada orang-orang, seperti yang terjadi pada masa Islam awal.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ferdi Engga, Malik ruslan syamsi, *Perspektif Marzuki ustman; Demasifikasi Pemerintahan*, Penerbit 262

<sup>15</sup> Abdullahi Ahmad An-naim, *Islam dan Negara Sekuler “ Menegosiasikan Masa depan Syariah”*, PT MIZAN Pustaka, Anggota IKAPI, 2007, hal. 11

<sup>16</sup>*Ibid*

### **Zakat: Cita Agama Kerakyatan**

Konsep keagamaan (kerohanian) bagi kita keadilan sosial yang dimulai dari lapisannya yang paling bawah, yaitu rakyat jelata perlulah ditegaskan disini bahwa “zakat” bukanlah sesuatu yang khusus pada agama Muhammad SAW. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Nabi Isa pun telah mencanangkan enam abad sebelumnya. ia berkata aku ini adalah hamba Tuhan yang telah memberikan kepadaku kitab, menjadikan aku nabi dan memberkatiku dimanapun aku berada, serta mewasiatkan kepadaku sholat dan zakat selagi umat masih ada (QS. Maryam: 30-310).<sup>17</sup>

Harapan PDI-Perjuangan dengan memberi peran ulama atau tokoh agama dan aktivis muslim (santri) dalam menjelaskan kadernya dalam memahaami konteks hidup beragama dan bernegara, dalam artian mengkaji dua pemikiran tokoh, dalam pemikiran Soekarno yang memisahkan agama dan negara dalam konteks pemisahan agama dan negara. Soekarno beranggapan bahwa persoalan agama dapat diselesaikan oleh pemeluk agama itu sendiri tanpa campur tangan negara sehingga agama bisa berkembang dan agama juga dapat memberikan masukan untuk negara.

Selain ini pemikiran Soekarno dalam politik Islam dan nasionalisme bisa dijadikan pengkajian dalam pergulatan politik saat ini. Selain ini juga sebagai akulturasi kedua pemikiran politik tersebut. dalam hal ini, penulis ingin mengetahui klaim-klaim terhadap agama dan partai dalam pandangan para aktivis Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan di Jakarta.

---

<sup>17</sup> Masdar F Mas'udi, *Agama keadilan, Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, P3M, Jakarta 1993, hal. 87.

Pengayaan informasi atau data dalam tesis yang mau peneliti susun dengan melihat kemajuan perpolitikan di Indonesia terutama pada partai demokrasi Indonesia (PDI-Perjuangan yang sangat dekat dengan sang proklamator dan merupakan penjelmaan PNI pada era Soekarno. Penulis berusaha menarik benang merah antara partai PNI era Soekarno dengan adanya Jamiatul Muslimin sebagai tempat ormas Islam di PNI dan juga mau melihat atau mengkaji sisi keislaman Soekarno dan pemahaman nasionalismenya, maka hal ini yang menarik untuk dikaji.

Jakarta-satu lagi keorganisasian massa bercorak Islam lahir di tanah air. Kali ini, untuk menampung ulama-ulama Islam yang nasionalis serta nasionalis yang ulama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membentuk sayap baru bercorak keislaman, yakni Baitul Muslimin Indonesia. Ormas baru ini dideklarasikan Kamis (29/3) siang ini di Markas DPP PDI-Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta.

Acara deklarasi ini dihadiri tokoh-tokoh Islam seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi, cendekiawan muslim seperti Azyumardi Azra serta Said Aqill Siradj. Ratusan ulama dari Matlaul Anwar, Banten, kyai-kyai khost dari Jawa Barat serta DKI Jakarta akan menyemarakkan berdirinya Baitul Muslimin Indonesia.

Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan pendirian Baitul Muslimin Indonesia tidak ada kaitannya dengan persiapan

Pemilu Presiden 2009, tetapi lebih dari keinginan untuk menampung gairah Islam yang ada di kalangan nasionalis.

“Saya berharap dengan berdirinya Baitul Muslimin tidak mengkotakkan antara ormas Islam yang sudah ada. Justru kita akan bersama-sama untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar*” kata Megawati seperti diungkapkan staf khusus bidang pers dan media mantan Presiden Megawati, Arie Junaedi.

Menurut Megawati Soekarnoputri, sejak awal, PDI-Perjuangan selalu mengakomodasi kepentingan umat, tidak saja dalam kiprah kepemimpinannya semasa menjabat Presiden, maupun setelah sekarang PDI-Perjuangan menjadi partai oposisi. Sikap konsistensi Megawati Soekarnoputri dan PDI-Perjuangan yang tidak pernah kompromi dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina serta perjuangan nuklir Iran telah terbukti selama ini.

Deklarasi Baitul Muslimin Indonesia melengkapi sayap-sayap organisasi yang dimiliki PDI-Perjuangan seperti sayap organisasi kewanitaan (Srikandi Demokrasi Indonesia) dan kepemudaan (Banteng Muda Indonesia).

### **“Move” Politik**

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf ketika dimintai tanggapannya mengatakan sangat wajar bila PDI-Perjuangan mendekatkan diri dengan kalangan Islam. “Bagi saya, ini biasa saja, tak lebih dari move politik,” katanya kepada SH, Kamis (29/3) siang.

Maswadi menyatakan pembentukan sayap itu merupakan bagian dari usaha PDI-Perjuangan untuk menghilangkan kesan sebagai “partainya orang Kristen” dan yang lebih penting lagi adalah usaha untuk meraih kembali kemenangan yang pernah diperoleh pada Pemilu 2004. Menurutnya, partai memang harus berusaha keras untuk meyakinkan pemilih atau konstituennya agar pada pemilu mendatang memberikan suara pada partainya. “Jadi, ya ini usaha PDI-Perjuangan, berhasil atau tidak tergantung langkah selanjutnya terhadap kalangan Islam,” tambahnya.

Saat ini tampilnya ulama dan aktivis muslim yang memainkan peran dalam pembentukan Baitul Muslimin di PDI-Perjuangan sangat memberikan arti bahkan dalam peran ini dapat dihubungkan dengan sejarah kedekatan ulama pada masa orla dukungannya terhadap PNI yang terwakilkan partai Masyumi dan NU. dalam mengkaji tiga masa orla, orba, reformasi. tidak terlepas banyaknya aktivis muslim yang bernaung dalam PDI-Perjuangan. melihat banyaknya atau sedikit peran mereka dalam merubah image PDI-Perjuangan dalam pandangan umat Islam dan terlebih tujuan perpolitikan aktivis Baitul Muslimin didalam inklusifitas di partai PDI-Perjuangan tersebut.

Pendirian Baitul Muslimin Indonesia yang merupakan sayap partai dari PDI-Perjuangan lebih banyak pada agenda dakwah ke masjid ataupun ke tempat DPD PDI-Perjuangan yang ada di wilayah DKI-Jakarta dan Pengurus Daerah Baitul Muslimin yang lain. Agenda yang sering dilakukan adalah melakukan dzikir Mega, menerbitkan buletin, majalah bulanan, melakukan

agenda keagamaan haji, korban pada acara hari raya dan membentuk lembaga zakat yang diberi nama LAZIS.

Baitul Muslimin yang lebih bertujuan untuk membangun citra partai dan untuk mengakomodir suara Islam yang belum terwadahi oleh PDI-Perjuangan dengan dilatarbelakangi kekalahan Mega-Hasyim pada pemilu 2004 dan suara 80% muslim yang tidak terwakilkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta karena faktor ketidakadilan. Baitul Muslimin adalah jawaban tentang koran beberapa waktu lalu yang mengatakan rumah muslim di kandang Banteng sehingga banyak mantan aktivis-aktivis PMII, HMI, GMMI, IMM, KAMMI dan lain-lain dan perwakilan ormas Islam baik NU maupun Muhammadiyah yang terlibat dalam pembentukan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dan menjadi caleg PDI-Perjuangan.<sup>18</sup>

Perpolitikan di PDI-Perjuangan yang mencoba membangun image sebagai partai nasionalis spriritualis sehingga suara pemilih umat Islam diakomodir di Baitul Muslimin Indonesia yang pada era reformasi kalangan umat Islam, misalnya, mengkonsolidasikan diri dengan membentuk sejumlah partai politik Islam seperti, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Kesatuan Bangsa, Partai Nahdhatul Ummah, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan lain-lain. kalangan nasionalis dikonsolidasikan melalui Partai Demokrasi Indonesia (Budi Hardjono), partai Demokrasi Indonesia, partai Keadilan dan Persatuan,

---

<sup>18</sup> *Wawancara Di DPP BAMUSI, Jakarta 15 januari 2009*

Golongan Karya, dan sejumlah partai lain yang dari segi dukungan tidak terlampau signifikan untuk diperhitungkan.

Kita juga menyaksikan konsolidasi kekuatan kalangan non Islam yang dapat dilihat dengan munculnya partai kristen indonesia dan partai katolik pada masa pasca kemerdekaan. Namun demikian, kalangan non-Islam ini tidak terlampau berharap dengan bentuk konsolidasi seperti itu. Saya melihat kalangan non-Islam lebih cenderung untuk ikut membesarkan, bahkan tidak mustahil mendominasi Partai Demokrasi Indonesia, terutama PDI-Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Sejumlah figur eks Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan partai katolik, ataupun generasi muda kelompok tersebut, terlihat sangat mewarnai PDI-Perjuangan.<sup>19</sup> Perpolitikan sekarang era reformasi inilah yang sangat menarik untuk dikaji bahkan banyaknya aktivis muslim atau rumah muslim dikandang banteng inilah menjadi tantangan kedepan perpolitikan di Indonesia bagi muslim di PDI-Perjuangan melalui Baitul Muslim Indonesia (BAMUSI) demi keadilan bagi muslim di PDI-Perjuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan aktivis muslim dalam pendirian Baitul Muslimin di markas DPP PDI-Perjuangan?
2. Bagaimana peranan aktivis Baitul Muslimin didalam pergulatan politik Islam dan politik nasionalisme?

---

<sup>19</sup> Affan Gaffar, *politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*, (pustaka pelajar, Yogyakarta 2004), hal. 352-353. s

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai pembentukan Baitul Muslimin di DPP PDI-Perjuangan bertujuan untuk:

1. Mengetahui peranan aktivis muslim dalam pembentukan Baitul Muslimin di DPP-PDI-Perjuangan di Jakarta
2. Menjelaskan peranan aktivis Baitul Muslimin dalam pergulatan politik Islam dan nasionalisme

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan bisa digunakan untuk menjelaskan peran Aktivis muslim atau santri dalam pembentukan Baitul Muslimin dan tujuan dari Baitul Muslimin dalam menopang perpolitikan di PDI-Perjuangan secara umum guna mencari benang merah dari sejarah pergulatan politik pada masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi saat ini

### **E. Tinjauan Pustaka**

Peneliti belum menemukan tulisan tentang pembentukan Baitul Muslimin dan peran-peran ulamanya dan aktivis muslim dalam pembentukan wadah muslim di PDI-Perjuangan tersebut dengan melihat realitas yang terjadi saat ini peneliti berusaha mengungkapkan latar belakang berdirinya Baitul Muslimin yang diprakarsai oleh para ulama dan kaum muda ormas agama sehingga sangat dimungkinkan PDI-Perjuangan yang dulunya dijustifikasi

sebagai partai abangan maka era sekarang sudah berubah seiring dengan kemajuan demokrasi di Indonesia. Pernyataan juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa: PDI-Perjuangan bukan partai abangan lagi dikotomi dari masyarakat umum dan kaum agamis tersebut dapat dibatahkan dengan berdirinya Baitul Muslimin beberapa waktu yang lalu.

Deklarasi Baitul Muslimin melengkapi sayap-sayap organisasi yang dimiliki PDI-Perjuangan seperti sayap organisasi kewanitaan (Srikandi Demokrasi Indonesia) dan kepemudaan (Banteng Muda Indonesia).

#### “Move” Politik

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf ketika dimintai tanggapannya mengatakan sangat wajar bila PDI-Perjuangan mendekatkan diri dengan kalangan Islam. “Bagi saya, ini biasa saja, tak lebih dari move politik,” katanya kepada SH, Kamis (29/3) siang.

Maswadi menyatakan pembentukan sayap itu merupakan bagian dari usaha PDI-Perjuangan untuk menghilangkan kesan sebagai “partainya orang Kristen” dan yang lebih penting lagi adalah usaha untuk meraih kembali kemenangan yang pernah diperoleh pada Pemilu 2004.

Menurutnya, partai memang harus berusaha keras untuk meyakinkan pemilih atau konstituennya agar pada pemilu mendatang memberikan suara pada partainya. “Jadi, ya ini usaha PDI-Perjuangan, berhasil atau tidak tergantung langkah selanjutnya terhadap kalangan Islam,” tambahnya.

## **F. Metodologi Pembahasan**

Penelitian ini adalah penelitian sosiologi historis yang menggunakan pendekatan sosiologis historis dan pendekatan rasionalistik. Pendekatan sosiologis historis berusaha untuk mengkaji peran-peran Ulama dan ormas-ormas Islam dalam pembentukan Baitul Muslimin. Pendekatan rasionalistik menitikberatkan pada Aspek rasional manusia sebagai landasan bagi terciptanya perilaku. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis historis dan rasionalistik digunakan untuk mengkaji rasionalistik aktivis muslim dan para ulama serta ormasnya dalam upayanya mendirikan Baitul Muslimin di markas PDI-Perjuangan menyikapi perpolitikan dimasa sekarang terutama dalam menampilkan wajah baru di PDI-Perjuangan dalam perpolitikan di Indonesia.

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dari wawancara langsung di lapangan dengan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku dalam pendirian Baitul Muslimin Indonesia dengan mengumulkan informasi dan dokumentasi yang sudah tertulis dalam arsip. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, literatur, majalah, internet dan tidak menutup kemungkinan data-data diperoleh dengan melihat isu-isu politik yang terjadi dan wacana opini publik yang diwacanakan sebagai pengayaan data bagi penulis.

Peneliti ingin mengkaitkan dan melihat fenomena proses perpolitikan masa lalu dengan sekarang. sebagai tuntutan masyarakat Indonesia dengan melihat tokoh politik, negarawan, budayawan, ilmuwan, akademisi, saudagar

dan perilaku politisi muda di Indonesia dalam mengubah wajah baru Indonesia. dengan melihat makin bermunculannya banyak partai di Indonesia seperti saat ini memperlihatkan pertumbuhan Demokrasi Indonesia semakin pesat tetapi disisi lain adalah banyak pelanggaran HAM di tengah masyarakat serta kebebasan yang kebablasan yang bertabrakan dengan budaya bangsa Indonesia. K.H. Muzadi dan Din Samsudin yang keduanya juga sangat andil besar dalam pembentukan Baitul Muslimin di markas DPP PDI-Perjuangan Jakarta dalam merekomendasikan nama-nama yang dilibatkan dalam program BAMUSI untuk wong cilik, sejalan dengan program pengentasan kemiskinan dan kaum *musmustadh'afin*.

Peneliti dalam hal ini berusaha melakukan pendekatan dengan menggunakan wacana discourse, media, opini publik, kajian historis tokoh, dengan melihat fenomena yang terjadi bahkan peneliti ingin andil dalam mengamati proses Pilkada di daerah yang terjadi sebelum pemilu dan pemilu yang, akan datang dan hasil sesudah pemilu dalam melihat permainan politik ulama umumnya dan khususnya peran ulama dalam pembentukan Baitul Muslimin. Memadukan dengan sumber dari buku-buku referensi dengan berusaha mencari data-data lapangan sebanyak mungkin dengan membatasi obyek penelitian yang jelas dengan mengumpulkan data dengan metode deduktif dan induktif (mengumpulkan data, baik data-data lapangan maupun teori yang terurai atau masih mentah dalam bentuk yang luas dengan melakukan penyederhanaan yang lebih sederhana).

Menurut bahasa, metode artinya cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Menurut Istilah, metode penelitian adalah bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>21</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan dalam penulisan proposal tesis ini adalah jenis penelitian gabungan antara penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). *Library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari hasil penelitian, media yang bisa membantu dalam penyusunan. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada dan berkaitan erat dengan persoalan yang penyusun kaji.<sup>22</sup>

Sedangkan penelitian lapangan yang akan penyusun lakukan meliputi dari berbagai aspek diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Kuntjoningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1977), hal. 16

<sup>21</sup> Lexy j. moloeng, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 1993), hal. 3.

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), hal. 11

a. Penentuan subyek dan obyek penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.<sup>23</sup> Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam hal ini adalah tokoh-tokoh aktivis Baitul Muslimin baik sebagai penggagas, pendiri, pengurus maupun ormas yang menggabungkan diri ke Baitul Muslimin ataupun pendapat non muslim tentang peran Aktivis muslim di Baitul Muslimin dalam perspektif mereka di PDI-Perjuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah masalah-masalah yang akan diteliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi obyeknya adalah pergulatan politik Islam dan Nasionalisme di Baitul Muslimin DPP PDI-Perjuangan.

b. Pengumpulan data

Adapun langkah pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi non partisipan yaitu observasi dimana pengamat berada diluar subyek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rieneka cipta, 1991), hal. 119.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 2002), hal. 87.

## 2) Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan untuk mengetahui Informasi yang lebih detail dan mendalam dari Informan. Wawancara dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan terkait peran aktivis muslim di Baitul Muslimin dalam pergulatan politik Islam dan Nasionalisme di PDI-Perjuangan. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan tentang topik yang ditawarkan. Dengan demikian informan merasa bebas menggunakan pikiran mereka. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, selanjutnya peneliti mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah dengan masalah penelitian.

### c. Analisis data

Adapun analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan dengan

menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.<sup>26</sup>

Untuk menjelaskan dan menyelesaikan berbagai masalah yang terdapat dalam pokok permasalahan yang telah penyusun rumuskan dalam proposal tesis ini, penyusun memilih metode deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis berbagai macam pemikiran yang ada kaitannya dengan permasalahan politik Islam dan Nasionalisme didalam pergulatan politik di Indonesia dan peran aktivis muslim diBaitul Muslimin PDI-Perjuangan. sampai meraih konklusi sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data terkumpul baik data dari kepustakaan atau data dari lapangan.

## **2. Pendekatan**

Pada dasarnya pendekatan yang akan dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah pendekatan historis-sosiologis yaitu dengan cara menelusuri sejarah pertumbuhan perkembangan (rincian historis) dari masalah yang dipaparkan disamping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan yuridis, disini diperlukan untuk melihat lebih jauh tentang pergulatan politik yang mempengaruhi pemahaman politik Islam dan Nasionalisme dari pandangan aktivis muslim.

---

<sup>26</sup> Winarto surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 139.

## **G. Kerangka Teoritik**

Dalam kerangka teoritik penulis mencoba mencari bahan bacaan yang terkait dengan Isu-isu ulama dan politik, tentang politik *siasyah islamiyah* (*maqosid syariah*) dan teori-teori masalah pada parpol dan bacaan tentang politik santri dan juga mengkaji pemahaman Soekarno dan aktivis muslim di (BAMUSI) tentang Islam dan Nasionalisme.

Selain itu sepanjang pengetahuan penulis, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, penyusun belum banyak menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang tema peran aktivis muslim di Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) di DPP PDI-Perjuangan dalam pergulatan politik Islam dan Nasionalisme. Baitul Muslimin adalah rumah muslim dikandang banteng yang baru didirikan, inilah hal yang penulis rasa layak untuk diangkat di publik. Penulis mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang mendalam tentang masalah tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang penulis lakukan untuk melihat pergulatan politik Islam dan Nasionalisme terutama yang berkaitan dengan Peranan aktivis muslim di Baitul Muslimin Indonesia DPP PDI-Perjuangan di jakarta hal ini sangat menarik untuk dibahas dalam penulisan tesis ini. Untuk mengetahui gambaran

umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini, maka perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang sejarah gerakan-gerakan politik Islam dan nasionalisme, sejarah gerakan aktivis muslim dalam pergulatan politik era orde lama, orde baru, reformasi.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang sejarah pembentukan berdirinya Baitul Muslimin oleh aktivis Muslim beserta tujuan, peran dan aktivitas DPP BAMUSI dan DPD sebagai sayap PDI-Perjuangan.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisa dari bab-bab sebelumnya

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran serta kesan.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Penelitian
- F. Metodologi Pembahasan
- G. Kerangka Teoritik
- H. Sistematika Pembahasan

## BAB II : PERANAN AKTIVIS MUSLIM DAN ULAMA DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA

- A. Sejarah Politik Islam dan Nasionalisme
- B. Sejarah Perpolitikan Aktivis Muslim di Indonesia.
- C. Pergulatan Politik Masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi
- D. Peranan Aktivis Muslim dan Ulama Dalam Menyikapi Politik Era Reformasi

## BAB III : PERANAN AKTIVIS MUSLIM DALAM PEMBENTUKAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA DI MARKAS DPP PDI-P

- A. Sejarah Terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia PDI-Perjuangan
- B. Sejarah Pembentukan Baitul Muslimin di Markas DPP PDI-Perjuangan
- C. Peranan dan Tujuan Aktivis Muslim Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) dalam Mewarnai Perpolitikan di PDI-Perjuangan
- D. Aktivitas Muslim dan Ormas-Ormas Islam di Baitul Muslimin
- E. Peranan Aktivis Muslim di DPP Dan DPD Baitul Muslimin Indonesia di DKI Jakarta sebagai Sayap PDI-Perjuangan sebagai Akomodir Suara Pemilih Muslim.

## BAB IV : MANFAAT DIDIRIKAN BAITUL MUSLIMIN INDONESIA BAGI PERPOLITIKAN DI INDONESIA BAIK DALAM PERGULATAN POLITIK ISLAM DAN POLITIK NASIONALISME

- A. Manfaat didirikan Baitul Muslimin Indonesia bagi Perpolitikan Di PDI-Perjuangan

- B. Sikap Para Ulama dan Peranan Aktivis Baitul Muslimin dalam  
Pergulatan Politik Islam dan Nasionalisme

## BAB. V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Kesan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut peneliti dari hasil penelitian ini dapat diambil titik temu yang mana dari pergerakan para aktivis muslim di Baitul Muslimin Indonesia, para aktivis muslim Indonesia memperjuangkan aspirasi masyarakat muslim Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan azas, jati diri dan watak PDI-Perjuangan. Peranan para aktivis muslim sebagai pemersatu bangsa yang multikultural di PDI-Perjuangan. Dalam geraknya berdakwah para aktivis Baitul Muslimin Indonesia berusaha memberikan pencerahan dan membentuk moral dan etika kader-kader PDI-Perjuangan.

Peranan aktivis Baitul Muslimin Indonesia dalam pergulatan politik Islam dan nasionalisme dalam pemahaman aktivis muslim di Baitul Muslimin Indonesia DPP PDI-Perjuangan berusaha memberikan pemikirannya tentang Islam, kebangsaan yang multikultural di negara Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peranan Aktivis Muslim adalah untuk pencitraan PDI-Perjuangan dan sekaligus juga membuat nuansa partai dari partai nasionalisme sekuler menjadi partai nasionalisme religius. Peran ulama dan pemimpin ormas Islam. PBNU dan PP Muhammadiyah berusaha menjembatani, mengakomodir suara Islam dan merekomondir aktivis muslim dalam program Baitul Muslimin Indonesia untuk wong cilik, sejalan dengan pengentasan program kemiskinan dan mustadh'afin.

Move politik Baitul Muslimin Indonesia juga bermain dalam ranah pergulatan politik dengan menjadikan caleg-caleg yang siap bertarung sebagai konsekuensi dari move politik dalam kemenangan PDI-Perjuangan di pemilu 2009 karena sebagai sayap Islam partai PDI-Perjuangan harus tampil “all out” dalam mendukung kemenangan PDI-Perjuangan yang seazas dan dalam tujuan strategis

Peranan Aktivis Baitul Muslimin Indonesia di PDI-Perjuangan dalam pergulatan politik Islam dan nasionalisme sangat signifikan terutama dalam hal dakwah dan merajut silaturahmi antar umat beragama, antar umat agama lain dan silaturahmi umat agama dan negara (dalam konteks kebangsaan) dalam upaya mencairkan dikotomi antar politik Islam dan nasionalisme.

## **B. Saran dan Kesan**

### **Saran**

- Seharusnya para aktivis muslim memiliki keberanian untuk menjelaskan Ideologi Islam sebagai rohmatan lil'alamina bagi perjuangan diri dan perjuangan diluar dirinya.
- Aktivis muslim atau santri seharusnya lebih menjadi garda depan bangsa bagi perpolitikan di Indonesia sehingga ketatanegaraan Indonesia yang diidam-idamkan oleh *founding fathers* dapat terlaksana.
- Berpolitik adalah sebagai tujuan untuk mencapai kekuasaan tapi dari sisi lain adalah niat untuk ibadah. Maka kita sepatutnya untuk berfikir positif, toleran dan memperkuat silaturahmi antar Islam dan non Islam dan tidak bicara hitam dan putihnya partai tapi bicara tentang fungsi partai untuk kesejahteraan rakyat.

**Kesan**

- Berpolitik itu indah tapi berpolitik anarkis dan memaksakan kehendak sendiri demi kepentingan golongan atau partai maka itu bertentangan dengan falsafah bangsa yang Pancasila dan Islam yang rahmat.
- Berpolitik yang cerdas seharusnya dapat menjadikan Islam sebagai sumber atau kaca benggala dalam etika dan moral aktor politik

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Islam*, Jakarta Pustaka Alvabet, 2001
- Ahmad An-naim, Abdullahi, *Islam dan Negara Sekuler* “Menegosiasikan Masa depan Syariah”, PT MIZAN Pustaka, Anggota IKAPI, 2007.
- Aminudin, *Kekuasaan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999
- Arif, M. *Jejak-jejak Islam politik*, Sinopsis sejumlah Hakim studi islam Indonesia, Direktorat perguruan tinggi Agama Islam ditjen kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI, Jakarta 2004.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991
- Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Chaidar, Al-, *Reformasi Prematur, Jawaban Islam Terhadap Reformasi total*, Jakarta: Darul Falah, 1998
- Dokumen Ir. Soekarno, *Dibawah Bendera Reevolusi*, Yayasan Bung Karno, Jakarta: 2005
- Engga Ferdi, Malik Ruslan Syamsi, Perspektif Marzuki Ustman; *Demasifikasi Pemerintahan*, Penerbit 262
- F Mas’udi, Masdar, *Agama keadilan, Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, P3M, Jakarta, 1993
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama sejarah NU 1952-1967*, LKIS, Yogyakarta, 1998
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.
- Haq Hamka, *Dokumen Piagam Kepemimpinan Perempuan, PDI-Perjuangan Bamusi*; Jakarta
- Iqbal Hasan M., *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gralia Indonesia, 2002
- J. Meloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993

- J. Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia*, LP3M Universitas Wahid Hasyim, Pustaka, 2005.
- Kiemas, Taufiq, *Buletin Bamusi*, ketua Dewan Pembina PP Baitul Muslimin Indonesia
- Kuntjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Manan Munafrizal, *Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, IRE Press Yogyakarta, 2005
- Megawati, *Dari Istana Menuju Istana Kedaulatan Rakyat*: Yogyakarta 2001
- Monsanto, Luka, *Tangan Besi Seratus Tiran Penguasa Dunia*, Galang Press, Yogyakarta tahun 2008
- P Huntinton, Samuel, *Tertib Politik, Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*, PT Raja Grafindo persada 2004
- Saefullah Fatah, Eep, *Masa depan Politik Islam: Dari pusaran menuju arus Balik” dalam Abu Zahra (ed), politik demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, ( Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Soekarno, Onghokham: *Mitos Dan Realitas”*, dalam Taufik AP3ES, Jbdullah (ed) manusia dalam kemelut sejarah, jakarta, 1981.
- Soekarnoputri Megawati, *Departement Keanggotaan Organisasi DPP PDI-Perjuangan* 2007
- Suhelmi Ahmad, Soekarno Versuss Nasir, “*Polemik Negara Islam*”, Teraju Jakarta Selatan: 2002.
- Sumawinata, Sarbini, *politik Ekonomi kerakyatan*, PT Garindo pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Surakhmad, Winarto, *pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung:Tarsito, 1985.
- Tobrani, KPU: *mengantar bangsa menuju demokrasi*, Jakarta: Nuansa Madani, 2000.
- Tono, Suwidi, Bung Karno *Negara Nasional dan cita-cita Islam*, Vision 03 Depok 2003.
- W. Hefner, Robert, *Civil Islam: Islam dan demokrasi di indonesia*, Jakarta: ISAI dan The Asia Fondation, 2001

Wahyudi Yudian, *Maqosid Syari'ah, dalam Pergumulan Politik*, Nawesea, Yogyakarta 2007

Warman Adam, Asvi, *Bung Karno di Fitnah*, yayasan Bung Karno, Jakarta 2006

Wawancara dengan Zuhairi Misrawi

Wawancara Di DPP Bamusi, Jakarta 15 januari 2009

Wawancara, Bapak Helmi Hidayat. Salah satu Ketua PP. Bamusi Jakarta

Wawancara, Mayjen TNI (Purn) H. Cholid GHozali, Ketua Dewan Penasehat PP BAITu Muslimin Indonesia

[www//Kapanlagi.com](http://Kapanlagi.com). tanggal 2 maret 2009

## **PERTANYAAN-PERTANYAAN PENELITIAN DI DPP PDI-PERJUANGAN JAKARTA**

Oleh :

Zainal Arifin, S.H.I

1. Apa peran Aktivis muslim dalam pergulatan politik Islam dan Nasionalisme pada masa Orde lama Orde Baru dan Reformasi ?
2. Apa peran aktivis muslim dalam pembentukan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di DPP PDI-Perjuangan?
3. Apa peran aktivis Bamusi dalam pergulatan politik Islam dan Nasionalisme?
4. Apa peran aktivis Bamusi dalam Civil Society kesejahteraan masyarakat?
5. Apa peran aktivis Bamusi dalam meningkatkan harkat martabat Bangsa dalam Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM?
6. Apakah ada keterlibatan NU dan Muhammdiyah dalam pembentukan Bamusi dan pewarnaan dalam PDI-Perjuangan?
7. Apa yang dilakukan Bamusi dalam membentuk karakter warga/ kader PDI-Perjuangan?
8. Ormas apa saja yang terlibat dalam pembentukan Bamusi?
9. Berapa banyakah caleg yang ada di PDI-Perjuangan yang ada di Bamusi yang bertarung dalam politik?
10. Apa peran aktivis Muslim/ santri di Bamusi yang menjembatani antara politik Islam dan Nasionalisme?